FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

**PERANAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM PEMBINAAN WARGA**

**NEGARA CERDAS YANG BERKARAKTER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

***BUDI PEKERTI EDUCATION ROLE IN DEVELOPING INTELLIGENT CITIZENS***

***WITH CHARACTERS IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0***

**Yunisca Nurmalisa1, Ana Mentari, Nurhayati, Hermi Yanzi**

**Abstrak**

Masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita saat ini adalah masalah krisis multidimensional dan degradasi moral karakter bangsa, serta isu disintegrasi bangsa sehingga pendidikan karakter dianggap menjadi solusi alternatif yang ampuh untuk menghadapi permasalahan moral bangsa yang makin memburuk. Fenomena saat ini, sering kita jumpai anak tidak lagi hormat pada orang tua, pergaulan bebas remaja, sikap-sikap anti sosial yang Nampak dari kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun masyarakat. Dalam persaingan global, suatu bangsa perlu menjadi bangsa yang inovatif agar menjadi bangsa yang unggul. Maka perlu adanya tatanan nilai dan kebijakan yang kuat agar krisis kebudayaan dan disintegrasi bangsa tidak terjadi di Indonesia. Pendidikan di Indonesia haruslah menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan yang berasal dari akar budaya bangsa dan jelas berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi dan nilai luhur bangsa. Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu revolusi mental. Melalui pendidikan budi pekerti diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembinaan warga negara cerdas yang berkarakter di tingkat mahasiswa.

**Kata kunci:** Pendidikan Budi Pekerti, Warga Negara Cerdas, Karakter, Revolusi Industri 4.0

1. PPKn FKIP Universitas Lampung



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 413 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

**PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk dapat mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0. Berbicara tentang perguruan tinggi tentunya bersingungan dengan istilah pendidikan yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Pendidikan pada era sekarang sangatlah penting hal ini dikarenakan kegiatan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari seperti halnya kebutuhan primer dan skunder manusia. Terutama di era Revolusi Industri 4.0 dimana jasa pendidikan dan bisnis industri juga sangat cepat perkembangannya, sehingga dalam segala aspek menjadi semakin kompetitif dan harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri juga sangat berpengaruh pada karakter manusia yang dapat berubah dengan cepat.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter, serta mampu menjalankan perannya di masa yang akan datang. Sementara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dibutuhkan pengintegrasian pemanfaatan internet dengan produksi di dunia industri yang

memanfaatkan kecangihan teknologi dan informasi. Pengembangan konsep pendidikan karakter yang secara umum banyak dikembangkan melalui konsep *multiple intelligence*.

Artinya pendidikan bukan saja harus membekali anak didik dengan pengetahuan yang memadai dan karakter yang baik, melainkan pendidikan juga harus membekali peserta didik

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mereka dapat memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Oleh karena itu pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pola pikiran, dan jasmani anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (wibowo, 2013: 2).

Pendidikan budi pekerti atau lebih dikenal saat ini dengan pendidikan karakter merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama di era sekarang dengan kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Pendidikan karakter diharapkan dapat menjadikan mahasiswa menjadi warga negara yang terampil, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Karena pada dasarnya kemampuan intelektual yang baik haruslah diimbangi dengan pendidikan karakter yang baik pula, dengan demikian pendidikan karakter akan dapat menghasilakn mahasiswa yang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 414 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

pintar, cerdas, dan berakhlak mulia (Youpika & Zuchdi, 2016: 47).

Sasaran pendidikan karakter saat ini ialah para remaja, hal ini dikarenakan generasi muda adalah penerus bangsa yang mempunyai kecerdasan intelektual yang baik, namun kecerdasan intelektual cenederung akan menjadi boomerang bagi negara kesatuan republik Indonesia jika tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Hal ini dapat dilihat seriiring perkembangan zaman permasalahan moral, budi pekerti, watak, atau karakter yang masih menjadi persoalan yang signifikan dalam menghambat pembangunan bangsa. Sebagai contohnya ialah meningkatnya degradasi moral dan etika, kurangnya sopan satun terhadap orang yang lebih tua, meningkatnya ketidakjujuran, berbicara dengan nada keras dan tidak sopan kepada orang tua, mencuri, dan pergaulan bebas. Degradasi moral terlihat dari prilaku remaja yang saat ini dianggap sudah menyimpang dari budaya masyarakat Indonesia. Djiwandono (2002) juga menyebutkan prilaku atau permasalahan yang sering terjadi pada remaja diantaranya ialah kenakalan remaja, gangguan emosi, penyalahgunaan obat bius (*drugs*) dan alkohol, dan kehamilan di luar nikah.

Fakta dari permasalahan moral yang telah dijabarkan menunjukkan bawasanya bangsa ini mengalami krisis

moralitas yang sangat menghawatirkan. Menurut Lickona (2003: 20) sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran jika memiliki sepuluh tanda-tanda moral anak yang perlu diperbaiaki dan diperhatikan yaitu; 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2) membudayanya ketidakjujuran; 3) sikap fanatik terhadap kelompok; 4) rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru;

1. semakin kaburnya moral baik dan buruk; 6) penggunaan bahasa yang memburuk; 7) meningkatnya perilaku yang merusak; 8) menurunnya etos kerja; 9) rendahnya rasa tangung jawab sebagai individu dan warga negara; 10) adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian atar sesama.

Untuk mengatasi, mencegah, dan menanggulangi permasalahan moral tersebut pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter memiliki peranan penting baik, terlebih di jenjang perguruan tinggi.

**PEMBAHASAN**

**Pendidikan Budi Pekerti/ Pendidikan**

**Karakter**

Pendidikan budi pekerti atau yang

lebih dikenal sebagai pendidikan karakter



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 415 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki prilaku agar lebih baik. Rawana, Franks, Brownlee, Rawana, & Neckoway (2011: 127) menyatakan, *“ caracter education* *programs have gained in creasing interest in the past decade and are designed to produce students who are thoughtful, ethical, morally responsible, community oriented, and self-disciplined”*. Kebaikanperilaku yang dimaksud ialah kebaikan dalam kepribadian yang bijaksana, beretika, bermoral, bertangung jawab, yang berorientasi pada disiplin diri dalam masyarakat.

Pengajaran budipekerti hendaknya diinsyafi dan tidak lain artinya daripada menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratinya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum (Dewantara, 1954; 2013, hlm. 485). Problem budi pekerti sebetulnya problem global yang dihadapi semua bangsa, bukan hanya Indonesia. Hasil statistik di Amerika Serikat berdasarkan survei Children Defense Fund (Suyanto, 2001; Suwarma2) menunjukkan bahwa,

setiap hari di AS terdapat 3 remaja di bawah umur 25 tahun meninggal karena AIDS, 6 anak bunuh diri, 342 anak melakukan tindak kekerasan, 1.407 bayi lahir dari anak belasan tahun di luar nikah,

2

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808332/peneliti an/budi+pekerti.pdf

2.833 anak putus sekolah, 6.042 anak ditahan kerana tindak kriminal, 135.000 anak ketahuan membawa senjata api. Di Indonesia sebagian dari gejala itu dapat disimak dalam berita kriminal, baik media elektronik dengan berbagai nama seperti Fokus, Lacak, Derap Hukum, Buser, dan sebagainya, dan media cetak. Tentu kita tidak menginginkan generasi kita mendatang rusak moral budi pekertinya karena nenek moyang kita terkenal bangsa yang ramah dan berbudi.

Hingga kini, perihal pendidikan

budi pekerti masih menjadi permasalahan

yang menuntut perhatian serius jika bangsa

ini ingin dipandang sebagai bangsa yang

beradab dan berbudaya (Sutjipto, 2014).

Sutiyono (2013), mengungkapkan bahwa,

“Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa (founding fathers) telah memikirkan pendidikan budi pekerti sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Namun, pada tahun 1970-an pendidikan budi pekerti dihilangkan. Dampak dari penghilangan pendidikan budi pekerti adalah akibat yang harus ditanggung bangsa Indonesia baru terasa kurang lebih 30 tahun berikutnya yang berupa bermacam-macam kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Masyarakat kembali bereaksi dan melakukan tuntutan untuk mengembalikan pendidikan budi pekerti yang telah dihilangkan pada tahun 1970-an. Kemudian pendidikan budi pekerti dicanangkan kembali tahun 1994.”



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 416 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Selanjutnya, Suwarma

meambahkan bahwa,

Pendidikan budi pekerti secara logika struktural telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan pendidikan budi pekerti secara integratif dengan mata pelajaran (integrated learning). Hal itu sebagai realisasi tuntutan dan reaksi publik atas penghilangan pendidikan budi pekerti pada tahun 1970-an. Akibat penghilangan itu dampaknya baru terasa kurang lebih 20 berikutnya, antara lain berbagai kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tahun 2000 pendidikan budi pekerti kembali mencuat ketika dilaksanakan suplemen kurikulum. Tahun 2000 Dikdasmen Jakarta menerbitkan buku I dan II yang berisi Pendidikan Budi Pekerti dan disusul tahun 2002 Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas Jakarta juga menerbitkan seri Pendidikan Budi Pekerti untuk tingkat SD hingga SLTA yang termuat dalam salah satu seri Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sayang buku-buku tersebut tidak menyajikan cara pembelajaran yang strategis guna mencapai tujuan pendidikan budi pekerti. Alhasil, hingga kini belum tampak tanda-tanda keberhasilan pendidikan budi pekerti. Buktinya, masih banyak perilaku menyimpang dari norma, betapa memilukan jika kita meresepsi berita kriminal dari media, baik cetak maupun elektronik3.

Selain itu, ada fenomena menarik

yakni dijadikannya pendidikan agama dan

3

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808332/peneliti an/budi+pekerti.pdf

budi pekerti menjadi mata pelajaran yang

berdiri sendiri mulai SD hingga sekolah

menengah dalam Kurikulum 2013 (dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014). Peraturan perundang-undangan ini, mengindikasikan bahwa pendidikan budi pekerti bukan hanya perlu

tetapi wajib ada dalam kurikulum

pendidikan di Indonesia.

Sutjipto (2014) menegaskan bahwa,

melalui pendidikan budi pekerti

perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa akan dapat diselaraskan dan diserasikan, sehingga dapat dicegah lahirnya pertentangan-pertentangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan budi pekerti akan dapat dilahirkan manusia-manusia pembangunan yang berbudi luhur, mencintai sesama, serta mencintai masyarakat dan bangsanya. Sehingga kehidupan masyarakat yang maju, aman, damai, makmur dan sejahtera akan dapat diwujudkan, sesuai

dengan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berkaitan dengan hal itu, Horton &

Chester (1991) menyatakan bahwa secara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 417 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

umum sosiologi melihat budi pekerti (*norms*) sebagai salah satu bentuk pengaturan interaksi sosial seperti juga kebiasaan (*habit/folkways*), adat (*custom*) dan hukum (*law*). Daya paksa budi pekerti lebih kuat dari kebiasaan, namun lebih rendah dari adat maupun hukum, sehingga dalam penegakan budi pekerti sering dikaitkan dengan lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat (Sutjipto, 2014, hlm.486). Oleh karena itu, konsep trisentra (yang meliputi, keluarga, sekolah dan masyarakat) harus dijalankan untuk ketercapaian tujuan pendidikan budi pekerti, agar rakyat Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan nilai luhur bangsa (Pancasila).

Terhadap anak-anak kecil pengajaran diberikan cukuplah kita dengan membiasakan mereka bertingkah laku yang baik, sedangkan bagi anak-anak yang sudah dapat berpikir, seharusnya diberikan penjelasan yang diperlukan. Supaya mereka dapat pengertian serta keinsyafan tentang kebaikan dan keburukan pada umumnya. Selanjutnya, untuk anak-anak dewasa kita berikan anjuran-anjuran untuk melakukan berbagai perilaku yang baik dengan cara disengaja. Pendidikan dan pengajaran budi pekerti mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara terpadu. Itulah maksud dan tujuan pemberian pengajaran budi-pekerti, dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan

perkembangan jiwa yang ada didalam hidup anak-anak, mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Dalam implementasi pendidikan budi pekerti yang perlu diperhatikan adalah upaya pembiasaan, pengamalan, pengkondisian lingkungan, dan keteladanan.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembanguanan

karakter merupakan upaya menjewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud langkah nyata mencapai tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskaan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 418 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Sejalan dengan perkembangan zaman yang cepat, terdapat berbagai masalah moral yang muncul termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk-bentuk penurunan moral yang lainnya. Terdapat beberapa gejala penurunan moral menurut Lickona (2015), antara lain: kekerasan dan tindakan anarki yang semakin marak, pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang

berlaku, tawuran antarsiswa, ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya serta sikap perusakan diri. Lickona (2015, hlm.

1. juga menjelaskan bahwa gejala-gejala penurunan moral tersebut merupakan gambaran tentang pengabaian generasi muda terhadap kepekaan moral merupakan sebuah kegagalan yang menuai masalah serius menyangkut etika dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Mulyasa (2014. hlm. 248), menyebutkan bahwa permasalahan bangsa saat ini, meliputi: 1) diorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; 3) bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

1. memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 5) ancaman



disintegrasi bangsa; 6) melemahnya kemandirian bangsa.

Winataputra (2012: 34) bahwa pembangunan karakter bangsa dijadikan arus utama pembangunan nasional sehingga setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberikan dampak positif terhadap pengembangan karakter. Oleh karena itu, pengembangan karakater dan pembangunan bangsa saling terkait. Pengembangan karakter menjadi misi utama dalam pembangunan bangsa. Sementara pembangunan bangsa dapat berhasil apabila didukung oleh pengembangan karakter bangsa.

Pendidikan karakter yang ditanamkan tentunya mengarah kepada kebaikan dan segala sesuatu hal yang positif sehingga pendidikan karakter perlu di lakukan di dalam pendidikan baik dari pendidikan disekolah, perguruan tinggi, rumah, serta di lingkungan masyarakat. Terlebih di zaman sekarang yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih yang diikuti dengan generasi milenial. Generasi yang memanfaatkan teknologi dengan maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengaruh positif dari pendidikan karakter dapat dijadikan bekal bagi kehidupan mahasiswa dalam berprilaku di zaman yang rawan akan degradasi moral ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 419 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dwiningrum | (2013: | 145) |

mengungkapkan “*character education is* *expected to overcome the crisis that occurred in the character of the global community and play a role in developing human potential optimally as well as develop patterns of thought and behavior of students who are responsible for the conduct of social roles in the family, society and citizens*”. Pendidikan karakterdiharapkan dapat mengatasi krisis yang terjadi dalam karakter masyarakat global dan mengembangkan potensi warga negara secara optimal serta mengembangkan pola pikir dan perilaku warga negara yang bertangung jawab atas pelaksanaan peran sosial dalam keluarga, masyarakat, dan sebagai warga negara yang tentunya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah budaya masyarakat Indonesia yang berpedoaman dan pancasila.

Pendidikan karakter juga dapat berperan dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pendidikan karakter merupakan proses untuk mengembangkan pada diri setiap individu kesadaran sebagai warga negara bangsa yang bermanfaat, merdeka, dan berdaulat, serta memiliki kemauan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Zamroni, 2011: 159). Maka, pendidikan karakter membantu terbentuknya warga negara yang berkarakter baik. Warga negara yang

berkarakter baik akan mengantarkan negara yang ditempatinya menjadi baik pula.

Selain itu, keberhasilan pembangunan karakter bangsa tak luput dari diarahkannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

**Strategi Pengembangan Karakter**

Stategi pembangunan karakter bangsa, diantaranya melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama (Mulyasa, 2014. hlm. 261). Strategi pengembangan karakter dan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan melalui pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 420 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan karakter yang dilaksanakan melalui pendidikan memiliki visi dan misi. Visi pendidikan demokrasi menurut Winataputra (2012: 44) adalah sebagai wahana substantive, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hiduo dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Indonesia. Winataputra (2012) menambahkan bahwa visi tersebut sesuai dengan makna dari *“learning democracy,* *through democracy, and for democracy”.*

Berdasarkan visi pendidikan demokrasi, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa misi, yaitu sebagai berikut (2012): (1) Melalui pendidikan demokrasi diharapkan dapat memfasilitasi warga negara untuk memperoleh berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi baik berupa teori maupun praktek sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai

(*weel-informed*); (2) Pendidikan demokrasi memiliki misi untuk memfasilitas warga negara agar dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi sehingga dapat memperoleh keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari serta bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut; (3) Melalui pendidikan demokrasi diharapkan dapat memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungan keluarga, masyarakat, negara.

Dengan demikian, pengembangan karakter dan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan melalui sistem pendidikan. Winataputra (2012) menjelaskan tentang desain induk pendidikan karakter yang disusun oleh kementerian pendidikan. Kementerian pendidikan menyusun Desain Induk Pendidikan Karakter sebagai kerangka paradigmatik implementasi pembangunan karakter bangsa melalui sistem pendidikan. Desain induk pendidikan karakter tersebut meliputi desain induk pendidikan karakter secara makro dan secara mikro.

1. **Secara makro** pengembangankarakter dapat dibagi dalam tiga



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 421 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

tahap antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil.

1. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan perangkat karakter yang digali, dikristalisasi, dan dirumuskan dengan memanfaatkan tiga sumber. Sumber pertama adalah filosofis yang terdiri atas sumber Agama, Pancasila, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 serta ketentuan perundangan pelaksananya. Sumber kedua yaitu pertimbangan teoretis yang meliputi teori tentang otak (*brain theories*),

psikologis(*cognitive* *development theories, learning theories, theories of*

*personality*),pendidikan (*theories of instruction,* *educational management, curriculum theories*), nilai danmoral (*axiology, moral* *development theories*), dansosial-kultural (*school culture,* *civic culture*).

1. Tahap implementasi mengembangkan pengalaman

belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik.

Implementasi pendidikan karakter dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan karakter diselenggarakan oleh tri pusat pendidikan, antara lain: satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pada masing-masing pilar pendidikan diusahakan untuk membangun pengalaman belajar melalui dua pendekatan, yaitu: intervensi dan habituasi.

Pendekatanintervensi

dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran untuk mencapai pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Sedangkan pada

pendekatan habituasi dilciptakan situasi dan kondisi (*persistent-life situation*), dan penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik membiasakan diri berperilaku sesuai nilai. Kebiasaan tersebut diharapkan dapat menjadi karakter karena telah diinternalisasi melalui proses intervensi. Dengan demikian, proses pembudayaan dan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pemberian

contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan yang dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis.

* + 1. Tahap evaluasi hasil dilakukan melalui asesmen program untuk perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk menilai aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter telah dilaksanakan dengan baik.
1. **Secara mikro**, pendidikan karakterdapat dibagi dalam empat pilar, antara lain: kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (*school culture*), kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
	1. Pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajara di

kelas dilaksanakan pengembangan karakter dengan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 422 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (*embeded approach*). Terlebih lagi, pada mata pelajaran yang memiliki fokus

utama pengembangan

nilai/karakter, pendidikan karakter apat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode pendidikan niali (*value/character education*). Mata pelajaran tersebut terdiri

atas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama (PA). PKn dan PA mengembangkan nilai/karakter sebagai dampak pembelajaran (*instructional* *effects*) dan juga dampakpengiring (*nurturan effects*). Sedangkan pada mata pelajaran yang lain, pendidikan karakter dikembangkan sebagai dampak

pengiring sehingga nilai/karakter peserta didik dapat berkembang seiring dengan pencapaian tujuan utama.

b. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan dikondisikan baik lingkungan fisik dan sosial kultural satuan pendidikan sehingga memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan yang lain terbiasa membangun kegiatan keseharian yang mencerminkan perwujudan nilai/karakter.

c. Pada kegiatan kokurikuler,

pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung dengan suatu materi dari suatu mata pelajara. Sedangkan pada

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang dilaksanakan bersifat umum dan tidak terkait

langsung dengan mata pelajaran. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dapat menunjang pelaksanaan pendidikan karakter.

d. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan melalui proses penguatan dari orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dapat dijadikan panutan terhadap perilaku berkarakter mulia bagi peserta didik. Perilaku-perilaku

yang mulai tersebut

dikembangkan sehingga menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat.

Dalam implementasi pendidikan

karakter, kualitas guru dapat ditinjau dari

dua segi yakni segi proses dan segi hasil.

Dari segi proses, guru dikatakan berhasil

apabila mampu melibatkan sebagian besar

peserta didik secara aktif, khususnya

mental, dan sosial dalam proses pendidikan

karakter disekolah selain dapat dilihat dari

gairah dan semangatnya dalam

melaksanakan pendidikan karakter di

sekolah, serta adanya rasa percaya diri.

Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan

berhasil apabila pendidikan karakter yang

dilaksanakan mampu mengadakan

perubahan karakter pada sebagian besar

peserta didik kearah yang lebih baik lagi.

Beberapa hal yang perlu guru miliki untuk

dapat mengembangkan pendidikan

karakter secara efektif, diantaranya:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 423 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Menguasai dan memahami pendidikan karakter dan hubungannya dengan pebelajaran dengan baik,
2. Menyukai pendidikan karakter,
3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya,
4. Menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi,
5. Mengeliminasi bahan-bahan yang kurang berkarakter dan kurang berarti,
6. Mengikuti perkembangan pendidikan karakter,
7. Mempersiapkan proses pendidikan karakter secara matang,
8. Mendorong peserta didiknya untuk memiliki karakter yang lebih baik, dan
9. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan karakter yang

akan dibentuk.

Guru merupakan pemeran utama, berhasil tidaknya dan faktor penting yang memiliki pengaruh yang terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Implementasi pendidikan karakter dapat berhasil, oleh sebab itu guru perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi,
2. Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik,
3. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan dengan mata pelajaran,
4. Memodifikasi dan memperkaya bahan,
5. Menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan, dan penyimpangan karakter,
6. Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan pendidikan karakter,
7. Memahami bahwa karakter peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama,
8. Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta

didik bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada proses pendidikan karakter, dan

1. Mengusahakan keterlibatan peserta

didik dalam berbagai kegiatan berkarakter.

Selain itu, pembelajaran berkarakter disekolah harus menampakkan adanya kegiatan, diantaranya, a) pembenahan lingkungan belajar, b) pembuatan perencanaan bersama, c) pembuatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 424 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

kelompok belajar, d) pengidentifikasian kebutuhan belajar, e) pengidentifikasian karakter peserta didik, f) perumudan tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, g) pengintegrasian karakter ke dalam tujuan standar kompetensi dan kompetendi dasar, h)

pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran, i) penilaian proses dan hasil belajar serta upaya mendiagnosis kembali kebutuhan belajar (Mulyasa, 2014. hlm.137).

**SIMPULAN DAN SARAN**

Pendidikan budi pekerti tujuannya adalah terwujudnya pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya (*kultural-nasional*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupanm yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan bangsa-bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Implementasi pendidikan budipekerti tidak lepas dari ruh kebangsaan untuk menuju kearah keluhuran dan kesucian hidup batin, serta ketertiban dan kedamaian hidup. Harapannya anak-anak bangsa kita menjadi warga negara yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsanya, dengan dia memahami dan merasakan jiwa

kebangsaan Indonesia, maka setiap warga

negara Indonesia mampu menjadi duta

bagi bangsa saat dia ke negeri orang.

Pendidikan karakter di era revolusi

industri 4.0, sangat perlu untuk dilakukan

pembiasaan dan pembudayaan untuk

generasi emas dan berkarakter.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dewantara, Ki Hajar. 2013. *Pemikiran,* *Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka: Jilid I Pendidikan*.(Cetakan Kelima). Yogyakarta: Penerbit Universitas Sarjanawiyata

Tamansiswa (UST-Press) bekerjasama dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Djiwandono,SEW. 2002. *Psikologi* *Pendidikan*. Edisi Revisi. Jakarta:

PT Grasindo.

Dwiningrum. S.I.A. 2013. Nation’s Character Education Based on The Social Capital Theory. *Journal* *Asian social science*. Vol 9 no 12.144-155

Horton, P. B., & Chester L. H. (1991). *Sosiologi Jilid I. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lickona, Thomas. 2013. *Education for* *character: mendidik untuk membentuk karakter (terjemahan juma abdu wamaungo).* New York:Catherine Gafell.

Lickona, Thomas. 2015. *Educating for* *Character Mendidik untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah data Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab.* Jakarta: Bumi Aksara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 425 |
|  |  |  |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Mulyasa, E. 2014. *Manajemen Pendidikan*

*Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rawana, J.R.E., Franks, J.L., Brownlee, K., Rawana, E,P. & Neckoway, R. 2011. The Aplication of a Strength-Based Approach of Students’ Behaviours to the Development of a Character Education Curriculum for Elementary and Secondary School. *Journal of Education* *Thought*. No 45, 127-144

Sutjipto. (2014). Pendidikan Budi Pekerti Pada Kurikulum Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.Vol.20 No.4. Edisi Desember 2014.

Sutiyono. (2013). Penerapan Pendidikan

Budi Pekerti sebagai Pembentukan

Karakter Siswa di Sekolah. *Jurnal*

*Pendidikan Karakter*. Tahun III.

No.3. Edisi Oktober 2013.

Suwarma, *Menelusuri Kegagalan Pendidikan Budi Pekerti.* [Online].

diakses dari http://staffnew.uny.ac.id/upload/1318 08332/penelitian/budi+pekerti.pdf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P R O S I D I N G S E M I N A R N A S I O N A L P E N D I D I K A N F K I P U N I L A 2 0 1 9 |  | 426 |
|  |  |  |

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Wibowo, agus. 2013. *Pendidikan karakter* *berbasis sastra: internalisasi nilai-nilai karakter melalui pengajaran sastra.* Yogyakarta: PustakaBelajar.

Winataputra, Udin Saripudin. 2012.

*Pendidikan* *Kewarganegaraan*

*dalam Perspektif Pendidikan untuk*

*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*

*(Gagasan, Instrumentasi, dan*

*Praksis).* Bandung: Widya Aksara

Press.

Youpika, Fitra & Zuchdi, Darmiyati. 2016. Nilai pendidikan karakter cerita rakyat suku pasemah bengkulu dan relevansinya sebagai materi pembelajaran sastra. *Jurnal* *Pendidikan Karakter*. Tahun VI,No. 1.

Zamroni. 2011. *Strategi dan model* *implementasi pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta: UNY Press